

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI KOMPARASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAN SURAKARTA)**

Arief Himmawan DN

Djoko Wahjudi

Universitas Stikubank Semarang

(ariefhimmawan@yahoo.co.id)

(jkw1052@yahoo.com)

ABSTRAK

Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam segala hal terutama finansial, karena tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang paling tinggi di Kota Semarang dan Surakarta. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dekriptif dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada DPKAD Kota Semarang dan DPPKA Kota Surakarta. Dalam periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD pemerintah Kota Semarang dan Surakarta perlu melakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Kata Kunci : pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

ABSTRACT

Implementation of the law number 32 in 2004 to encourage local governments to be more independent in governance in their respective regions. This encourages regions to be more independent in all respects, especially financially, because the level of independence of a region can be seen from the high and low revenue. Local taxes and levies are a source of revenue that is highest in Semarang and Surakarta. Data analysis method used by the writer is descriptive analysis of the contribution and effectiveness analysis. The population in this study is the local taxes and levies contained in DPKAD DPPKA Semarang and Surakarta. In the period of 2010-2012 fiscal year revenue contribution of local taxes to be optimal in Semarang with an average contribution of 52.73% per year. While the contribution levies to be optimized PAD in Surakarta with an average contribution of 37.25% per year. The contribution of local taxes to a larger budget in Semarang with the ability to finance the expenditure amounted to 10.45% per year, so that the government of Semarang can be said to be more independent. Contributions levies to bigger budget in Semarang with the ability to finance the expenditure amounted to 5.23% per year, so that the government of Semarang can be said to be more independent. To increase the contribution of local tax revenues and levies to the total revenue and simultaneously increase its contribution to the budget the government of Semarang and Surakarta need to do several steps of which is necessary to increase the intensification of collection types of local taxes and levies, and then carried out extension by way of enacting types tax and new levies in accordance with the conditions and the potential that exists.

Keywords: local taxes, levies, local revenue (PAD), budget (APBD).

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal

ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam segala hal terutama finansial karena tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya PAD. Di Jawa Tengah Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan

sumber PAD yang paling tinggi di Kota Semarang dan Surakarta.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hendaknya pemerintah daerah berusaha lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Realitas hubungan fiskal antara pusat dengan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat jelas dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan pusat.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kota Semarang. Selaras dengan *motto* Kota Semarang untuk membangun motivasi guna mengoptimalkan potensi Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah–masyarakat–swasta) untuk bersama membangun dan men seajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi Visi dan Misi Kota Semarang 2010-2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai *akronim* Semarang Kota Sejahtera yang merupakan sasaran akhir pembangunan.

Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infrastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan.

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, perlu adanya kegiatan pemerintah dengan pemerintah Provinsi/kabupaten/kota serta program dan kegiatan provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai sinergisitas sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, supaya dihindari adanya tumpang tindih pendanaan antara urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang dan Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang dan Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap APBD Kota Semarang dan Kota Surakarta
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap APBD Kota Semarang dan Kota Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Laporan Akhir Isia Kumala Sari yang berjudul *Analisis Pajak Reklame di Kota Semarang* bahwa “Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang seimbang digunakan untuk membiayai penyeleng

garaan pemerintah daerah dan pelaksanaannya diatur dengan perintah daerah". Jadi pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah yang bersifat wajib dan dipaksakan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pemerintah daerah dan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Daerah.

Pengertian Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Laporan Akhir Isia Kumala Sari yang berjudul *Analisis Pajak Reklame di Kota Semarang* bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat dari pengelolaan potensi-potensi daerah yang digunakan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah dari dalam wilayahnya sendiri untuk memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ketergantungan pemerintah daerah dan pusat dibuktikan dengan besarnya subsidi pemerintah pusat ke daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (18) menjelaskan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan". Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasannya, bahwa "Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan daerah yang ber sumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

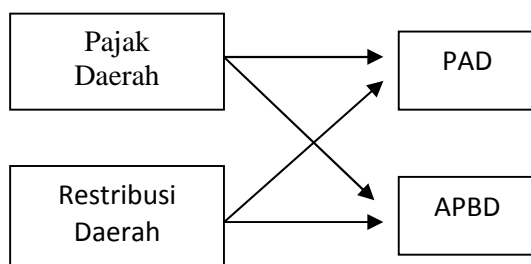
Otonomi Daerah

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman *disintegrasi* bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabu paten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara *proporsional*. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pem bagian, dan pemanfaat an dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara *skema* kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta tahun 2010 sampai dengan 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan dokumen. Menurut Sugiyono (2008:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008). Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan analisis ini penulis akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Semarang dan Surakarta. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tiga tahun (2010 – 2012), akan didapatkan hasil analisis yang berflutuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak dan retribusi daerah dalam menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Semarang dan Surakarta.

Analisis Efektivitas

Analisis efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak dan retribusi daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak dan retribusi daerah semakin efektif dan untuk melihat efektifitasnya adalah dengan membandingkan efektifitas pada tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Semarang dan Surakarta

Perkembangan target yang telah ditetapkan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Surakarta dalam kurun waktu tiga tahun 2010 s/d 2012 dapat dilihat dari tabel berikut

Tahun Angg	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	237	267	30	113.04
2011	291	306	14	105.14
2012	314	327	13	104.24

menggambarkan bahwa selama tiga tahun terakhir realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang selalu melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2010 realisasi pendapatan asli daerah sebesar 113,04% atau dalam nilai

nominal sebesar Rp. 267.914.250.403,- dari target yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 237.004.661.288,-.

Tahun Angg	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	96	102	6	107.00
2011	110	101	(8,)	92.00
2012	114	113	(483)	99.58

menggambarkan bahwa selama tiga tahun terakhir realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tidak selalu melebihi target yang ditentukan.

Perkembangan Pajak Daerah Kota Semarang dan Surakarta

Besarnya pajak daerah tergantung dari potensi daerah itu sendiri. Kota Semarang yang *notabene* sebagai kota perdagangan yang strategis dan sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang signifikan untuk diperdagangkan dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah. Begitu juga dengan Kota Surakarta, yang *notabene* sebagai kota budaya dan memiliki daya tarik wisata di Jawa Tengah.

Tahun Agg	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	132	143	10	108,08
2011	146	154	8	105,72
2012	162	177	15	109,34

Secara umum, dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2012, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mencapai lebih dari 100% dengan perolehan

rata-rata sebesar 107,71%, meskipun perkembangan presentase pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.

Angka realisasi pajak tertinggi diperoleh dari realisasi pajak hiburan sebesar 133,56% per tahun dan pajak hotel sebesar 123,36% per tahun. Sedangkan pertumbuhan perolehan pajak terkecil diperoleh dari realisasi pajak reklame sebesar 102,28% per tahun dan pajak galian golongan C sebesar 52,25% per tahun.

Perkembangan Pajak Daerah Kota Surakarta

Tahun	Tahun 2010 S/D 2012			
	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	45	46	1	102,35
2011	51	52	0,7	101,36
2012	54	61	7	113,26

Perolehan pajak daerah Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu mencapai lebih dari 100% dengan perolehan rata-rata sebesar 105,66%, meskipun perkembangan presentase pajak daerah dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuatif.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Semarang

Ket	Tahun 2010 S/D 2012		
	Real 2010	Real 2011	Real 2012
PAD	267	306	327
Pajak D	143	154	1777
%	53,55	50,47	54,17

Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 53,55% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 143.460.194.601,- terhadap realisasi PAD yang sebesar Rp. 267.914.250.403,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 50,47%.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta

Ket	Tahun 2010 S/D 2012		
	Real 2008	Real 2009	Real 2010
PAD	102	101	113
Pajak D	46	52	61
%	45,52	51,15	54,10

Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 45,52% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.855.622.021 terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 102.929.501.970,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,15%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini juga naik menjadi Rp. 52.163.818.689,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 101.972.318.682,-. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,10%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini juga naik menjadi Rp. 61.641.623.410,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-.

Perkembangan Retribusi Daerah Kota Semarang dan Surakarta

Selain menerapkan beragam jenis pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta juga menerapkan pungutan dalam bentuk retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta untuk kepentingan pribadi atau badan.

Perkembangan Retribusi Daerah Kota Semarang

Tahun 2010 S/D 2012				
Tahun	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	79	84	5	106.87
2011	73	69	-3	94.72
2012	83	80	-2	96.77

Pencatatan retribusi daerah Kota Semarang yang diberlakukan saat ini adalah menurut kelompok per SKPD, yang bertujuan untuk melihat tingkat kinerja per SKPD. Tabel 4.9 menggambarkan bahwa rata-rata perolehan Retribusi Daerah Kota Semarang selama tiga tahun terakhir sebesar 99,45%, sehingga bisa dikatakan penerimaan retribusi daerah di Kota Semarang sudah efektif.

Perkembangan Retribusi Daerah Kota Surakarta

Tahun 2010 S/D 2012				
Tahun	Target (Rp)	Real (Rp)	+/- (Rp)	%
2010	35	39	3	110.54
2011	41	37	-4	91.69
2012	42	41	-1	97.27

Rata-rata realisasi perolehan masing-masing retribusi daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun (2010 -2012) berkisar antara 0,00% - 183,37% per tahun. Angka realisasi retribusi tertinggi diperoleh dari jenis retribusi jasa umum pada bagian retribusi penggantian biaya cetak peta sebesar 183,37% per tahun dan dari jenis retribusi perizinan tertentu pada bagian retribusi izin gangguan/keramaian sebesar 147,81% per tahun.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta

Dalam periode tahun anggaran tahun 2010 – 2012, perolehan komponen retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di

Kota Semarang maupun Surakarta memainkan peranan yang cukup besar.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang

Tahun 2010 S/D 2012			
Ket	Real 2010	Real 2011	Real2012
PAD	267	306	327
Retribusi D	84	69	80
%	31,64	22,93	24,56

Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Semarang per tahunnya adalah sebesar 26,34% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Semarang mengalami *fluktuatif*.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta

Tahun 2010 S/D 2012			
Ket	Real 2010	Real 2011	Real 2012
PAD	102	101	113
Retr Daerah	39	37	41
%	38,21	37,05	36,5

Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Surakarta per tahunnya adalah sebesar 37,25% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Surakarta terus mengalami penurunan.

Perkembangan APBD Kota Semarang dan Surakarta

Target kinerja APBD merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan. Dari laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemda selama satu tahun fiskal.

Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Perkembangan APBD Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Tahun Anggaran 2010	
	Anggaran	Realisasi
Penpatan	1,225	1,337
Belanja	1,506	1,325
Surplus / Defisit	(281)	12

Keterangan	Tahun Anggaran 2011	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1,447	1,538
Belanja	1,731	1,505
Surplus / Defisit	(283)	32

Keterangan	Tahun Anggaran 2012	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1,594	1,623
Belanja	1,898	1,732
Surplus / Defisit	(304)	(109)

menggambarkan pelaksanaan APBD Tahun 2010, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan pola anggaran Defisit sebesar Rp. 281.310.081.523,-, dan dalam pelaksanaannya terealisasi Surplus sebesar Rp. 12.395.437.915,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.325.301.609.216,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar Rp. 1.337.697.407.131,-. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang mengembangkan pola anggaran Defisit sebesar Rp. 283.416.093.538,-, dan dalam pelaksanaannya terealisasi Surplus sebesar Rp. 32.988.201.380,-. Hal itu terjadi karena realisasi belanja sebesar Rp. 1.505.502.336.136,- tidak lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang sebesar

1.538.409.537.516,-. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang mengembangkan pola anggaran Defisit sebesar Rp. 304.214.935.618,-, dan dalam pelaksanaannya terealisasi Defisit sebesar Rp. 109.094896.578,-.

Perkembangan APBD Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Tahun Anggaran 2010	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	732	751
Belanja	854	760
Surplus / Defisit	(122)	(8)

Keterangan	Tahun Anggaran 2011	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	799	728
Belanja	869	747
Surplus / Defisit	(70)	(18)

Keterangan	Tahun Anggaran 2012	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	870	858
Belanja	885	825
Surplus / Defisit	(14)	32

menggambarkan pelaksanaan APBD Tahun 2010, Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pola anggaran Defisit sebesar Rp. 122.068.158.202,-, dan dalam pelaksanaannya terealisasi Defisit sebesar Rp. 8.812.409.510,-.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Pendapatan	1,337	1,538	1,623
Pajak Daerah	143	154	177
%	10,72	10,04	10,94

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 10,04% - 10,94%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 10,57%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010–2012 mengalami fluktuatif.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Belanja	1,325	1,505	1,732
PAjak Daerah	143	154	177
%	10,82	10,26	10,25

Sedangkan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 10,25% - 10,82%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 10,45%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Pendapatan	751	728	858
Pajak Daerah	46	52	61
%	6,24	7,16	7,18

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,24% - 7,18%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 6,86%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 6,24%, kemudian meningkat sebesar 7,16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 7,18%.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Belanja	760	747	825
Pajak Daerah	46	52	61
%	6,61	6,98	7,46

Di Kota Surakarta, kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 6,87%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memainkan perannya dalam memberikan kontribusi terhadap APBD di Kota Semarang dan Surakarta. Meskipun peranan retribusi daerah tidak terlalu besar dalam kontribusi terhadap APBD, komponen ini tetap memberikan pengaruh dalam kontribusinya.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Pendapatan	1,337	1,538	1,623
Retribusi D	84	69	80
%	6,34	4,54	4,96

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,54% - 6,34%, dengan rata-rata kontribusi pertahunnya sebesar 5,28%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami *fluktuatif*.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Semarang

Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2011
Belanja	1,325	1,505	1,732
Retribusi D	84	69	80
%	6,40	4,64	4,65

Sedangkan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,64% - 6,40%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,23%. Pertumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 mengalami *fluktuatif*.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Pendapatan	751	7282	858
Retribusi D	39	37	41
%	5,23	5,18	4,84

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,84% - 5,23%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus-menerus mengalami penurunan.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surakarta

Tahun 2010 S/D 2012

Keterangan	Real 2010	Real 2011	Real 2012
Belanja	760	747	825
Retribusi D	39	37	41
%	5,17	5,06	5,04

Di kota Surakarta, kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan.

PEMBAHASAN

Penulis membahas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lokasi penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta

Beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang *kondusif*. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk

memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah.

Dalam periode tahun anggaran 2010 – 2012, perolehan Pajak Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang memainkan peranan yang cukup besar. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata perolehan total pajak per tahunnya sebesar 52,73% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang mengalami *fluktuatif*. Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 53,55% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 143.460.194.601,- terhadap realisasi PAD yang sebesar Rp. 267.914.250.403,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 50,47%. Walau pada tahun ini kontribusi mengalami sedikit penurunan, namun secara kuantitatif perolehan dari komponen ini naik menjadi Rp. 154.505.287.140,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 306.112.422.821,-. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,17%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini naik menjadi Rp. 177.680.372.947,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 327.992.258.750,-. Di Kota Surakarta dalam periode tahun anggaran 2010 – 2012, perolehan Pajak Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah memainkan peranan yang cukup besar pula. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata perolehan total pajak per tahunnya sebesar 50,26% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 45,52% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.855.622.021 terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 102.929.501.970,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,15%, dan secara kuantitatif

perolehan dari komponen ini juga naik menjadi Rp. 52.163.818.689,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 101.972.318.682,-. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,10%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini juga naik menjadi Rp. 61.641.623.410,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-.

Kontribusi rata-rata per tahun pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar 52,73% dan Surakarta sebesar 50,26%, jadi selisih kontribusi rata-rata per tahun pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar dan Surakarta sebesar 2,47%. Sehingga dapat dilihat kontribusi rata-rata pajak daerah per tahun lebih besar Kota Semarang, jadi dapat dikatakan Pemerintah Kota Semarang lebih optimal dalam pemungutan pajaknya. Hal itu juga didukung oleh partisipasi dari masyarakatnya yang tertib, dan tingkat kesadaran dalam membayar pajak yang tinggi. Meskipun begitu baik Kota Semarang maupun Surakarta sudah efektif dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Namun Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta dapat mencari sumber-sumber pajak daerah yang lain agar dapat menambah kontribusinya.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Semarang dan Surakarta

Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Semarang per tahunnya adalah sebesar 26,34% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Semarang mengalami *fluktuatif*. Pada tahun Anggaran 2010 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 31,64% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 84.757.259.284,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 267.914.250.403,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 22,83%,

dan secara kuantitatif perolehan komponen ini juga menurun, yaitu sebesar Rp. 69.874.090.022 terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 306.112.422.821,-. Kontribusi retribusi daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 24,56%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini naik sebesar Rp. 8.559.886.885,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 327.992.258.750,-.

Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Surakarta per tahunnya adalah sebesar 37,25% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Surakarta terus mengalami penurunan. Pada tahun Anggaran 2010 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 38,21% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 39.325.240.832,- terhadap realisasi PAD sebesar 102.929.501.970,-. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 37,05%, dan secara kuantitatif perolehan dari komponen ini juga menurun, yaitu sebesar Rp. 37.783.489.120,- terhadap realisasi PAD sebesar 101.972.318.682,-. Kontribusi retribusi daerah kembali menurun yaitu pada tahun 2012 sebesar 36,50%, namun secara kuantitatif perolehan dari komponen ini naik menjadi Rp. 41.588.097.172,- terhadap realisasi PAD sebesar Rp. 113.946.007.541,-.

Kontribusi rata-rata per tahun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar 26,34% dan Surakarta sebesar 37,25% jadi selisih kontribusi rata-rata per tahun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar dan Surakarta sebesar 10,91%. Sehingga dapat dilihat kontribusi rata-rata retribusi daerah per tahun lebih besar di Kota Surakarta, jadi dapat dikatakan Pemerintah Kota Surakarta lebih optimal dalam pemungutan retribusinya. Hal itu juga didukung oleh partisipasi dari masyarakatnya yang tertib, dan tingkat kesadaran dalam

membayar retribusi yang tinggi. Meskipun begitu baik Kota Semarang maupun Surakarta sudah efektif dalam melakukan pemungutan retribusi daerah. Namun Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta dapat mencari sumber-sumber retribusi daerah yang lain agar dapat menambah kontribusinya.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 10,04% - 10,94%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 10,57%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 10,72%, kemudian turun sebesar 10,04% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 10,94%.

Sedangkan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2011 berkisar antara 10,25% - 10,82%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 10,45%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2011 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 10,82%, kemudian menurun sebesar 10,26% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah kembali menurun yaitu sebesar 10,25%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan pajak daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal.

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,24% - 7,18%, dengan

rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 6,86%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 6,24%, kemudian meningkat sebesar 7,16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 7,18%.

Di Kota Surakarta, kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 6,87%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 6,16%, kemudian meningkat sebesar 6,98% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah kembali meningkat yaitu sebesar 7,46%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Surakarta dalam memberdayakan pajak daerah untuk membiayai belanja daerah sudah optimal.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah di Kota Semarang yang diperoleh mampu untuk membiayai belanja daerah rata-rata per tahun sebesar 10,45%, sedangkan di Surakarta rata-rata per tahun sebesar 6,87%. Hal itu berarti kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah lebih besar di Kota Semarang dari pada Kota Surakarta yang selisihnya sebesar 3,58%. Selisih tersebut cukup besar, hal itu dikarenakan dalam periode tahun 2010 - 2012 di Surakarta tidak memiliki perolehan pajak daerah dari pajak bahan galian golongan C seperti di Kota Semarang. Jadi dapat dikatakan tingkat kemandirian daerah, lebih mandiri Kota Semarang dari pada Kota Surakarta. Namun pemerintah kota Semarang perlu untuk melakukan evaluasi, karena dari tahun 2010 –

2012 kontribusi pajak daerah terhadap belanja daerah terus mengalami penurunan, sedangkan di Kota Surakarta kontribusi pajak daerah terhadap belanja daerah terus mengalami peningkatan pada periode tersebut.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap APBD Kota Semarang dan Surakarta

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,54% - 6,34%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 5,28%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami *fluktuatif*. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah sebesar 6,34%, kemudian turun sebesar 4,54% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah kembali naik yaitu sebesar 4,96%.

Sedangkan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2011 berkisar antara 4,64% - 6,40%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,23%. Pertumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 6,40%, kemudian menurun sebesar 4,64% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah kembali meningkat yaitu sebesar 4,65%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan retribusi daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal.

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,84% - 5,23%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah

dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah sebesar 5,23%, kemudian turun sebesar 5,18% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah juga menurun yaitu sebesar 4,84%.

Di kota Surakarta, kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 5,17%, kemudian menurun sebesar 5,06% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,04%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Surakarta dalam memberdayakan retribusi daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, retribusi daerah di Kota Semarang yang diperoleh mampu untuk membiayai belanja daerah rata-rata per tahun sebesar 5,28%, sedangkan di Surakarta rata-rata per tahun sebesar 5,09%. Hal itu berarti kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah lebih besar di Kota Semarang, namun hanya selisih 0,19%. Meski begitu tingkat kemandirian daerah, lebih mandiri Kota Semarang dari pada Surakarta.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang

dan Surakarta, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam periode tahun anggaran 2010 – 2012, kontribusi rata-rata perolehan total pajak per tahunnya sebesar 52,73%. Kontribusi pajak daerah Kota Semarang mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 53,55%. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 50,47%. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,17%. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tersebut, rata-rata kontribusi pajak daerah tiap tahunnya sebesar 50,26% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun Anggaran 2010 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 45,52%. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,15%. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 54,10%. Selisih kontribusi rata-rata per tahun pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar dan Surakarta sebesar 2,47%.
2. Dalam kurun waktu tersebut kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Semarang per tahunnya adalah sebesar 26,34% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Semarang mengalami fluktuatif. Pada tahun Anggaran 2010 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 31,64%. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 22,83%. Kontribusi retribusi

daerah kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 24,56%. Kontribusi rata-rata perolehan total komponen retribusi daerah di Kota Surakarta per tahunnya adalah sebesar 37,25% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Surakarta terus mengalami penurunan. Pada tahun Anggaran 2010 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 38,21%. Pada tahun anggaran 2011 kontribusi pajak daerah sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 37,05%. Kontribusi retribusi daerah kembali menurun yaitu pada tahun 2012 sebesar 36,50%. Selisih kontribusi rata-rata per tahun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang sebesar dan Surakarta sebesar 10,91%.

3. Kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 per tahunnya sebesar 10,57%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami *fluktuatif*. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 10,72%, kemudian turun sebesar 10,04% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 10,94%. Sedangkan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 10,25% - 10,82%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 10,45%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 10,82%, kemudian menurun sebesar 10,26% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah

dalam membiayai belanja daerah kembali menurun yaitu sebesar 10,25%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan pajak daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal. Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,24% - 7,18%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 6,86%. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 6,24%, kemudian meningkat sebesar 7,16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah kembali naik yaitu sebesar 7,18%. kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah di Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% - 7,46%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 6,87%. Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 6,16%, kemudian meningkat sebesar 6,98% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah kembali meningkat yaitu sebesar 7,46%.

4. Kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 per tahunnya sebesar 5,28%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah sebesar 6,34%, kemudian turun

sebesar 4,54% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah kembali naik yaitu sebesar 4,96%. Sedangkan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,64% - 6,40%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,23%. Perumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 mengalami *fluktuatif*. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah sebesar 6,40%, kemudian menurun sebesar 4,64% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah kembali meningkat yaitu sebesar 4,65%. Jadi dapat dikatakan potensi Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan retribusi daerah untuk membiayai belanja daerah belum optimal. Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 berkisar antara 4,84% - 5,23%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu anggaran 2010 – 2012 terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah sebesar 5,23%, kemudian turun sebesar 5,18% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah juga menurun yaitu sebesar 4,84%. Di kota Surakarta, kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2011 berkisar antara 5,04% - 5,17%, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,09%. Pertumbuhan kemampuan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah pada tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 kemampuan retribusi daerah dalam

membiayai belanja daerah sebesar 5,17%, kemudian menurun sebesar 5,06% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kemampuan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,04%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, (2002).
- Amri, (2009), *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Dini, (2010), *Analisis Pajak Reklame Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Isia, (2008), *Analisis Pajak Reklame di Kota Semarang*, Praja IPDN, Jatinangor.
- Mardiasmo, (2010), *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Mohammad Riduansyah, (2003), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Universitas Indonesia, Depok.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2011 tentang *Pajak Parkir*.

- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 09 Tahun 2009 tentang *Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang*.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang*.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang*.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun (2007) tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*.
- Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013.
- Semarang Dalam Angka Tahun 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung, (2008).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Kepmendagri No. 29 Tahun (2002) tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, (2009).
- http://semarangkota.go.id/cms/index.php?option=com_wrapper&Itemid=321. "Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran". 08 Oktober 2013.
- <http://www.solopos.com/2011/ekonomi-bisnis/2011-ekonomi-solo-lebih-optimistis-81249>. "2011, "Ekonomi Solo Lebih Optimis". Selasa, 04 januari 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.

